

## **BAB II** **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Otonomi Daerah**

UU No. 23 Tahun 2014 mendefinisikan otonomi daerah sebagai Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan pada dasar hukum UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:59), Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan hidup demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.2 Keuangan Daerah**

Keuangan daerah menurut Mamesah dalam Halim (2008:23-25) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Fungsi utama laporan keuangan adalah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun peranan laporan keuangan pemerintah menurut Batafor (2011) meliputi: akuntabilitas, manajemen, keseimbangan antar generasi (*inter generational equity*) dan transparansi. Tujuan penyajian laporan keuangan

sektor publik menurut *Governmental Accounting Standart Board* adalah untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik dan untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi.

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Sesuai UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh Kepala Daerah setidaknya meliputi: Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut Halim (2009:119) adalah transparansi, akuntabilitas serta *value for money* (ekonomis, efektif, dan efisien).

### **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD menurut Wayong (1962) dalam Halim (2008:20) didefinisikan sebagai rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan Legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang.

### **2.3.1 Struktur APBD**

Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - b. Dana perimbangan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada vertikal dalam negeri.

- b. Belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan Jaringan, serat belanja aset daerah.
  - c. Belanja tidak terduga
  - d. Belanja transfer
3. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas:
- a. Penerimaan daerah yang terdiri atas Sisa laba perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), Pencairan dana, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, Penerimaan piutang daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - b. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

## **2.4 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. (Wikipedia, 2022). Dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan/instansi tidak dibuat secara langsung, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan yang telah berlaku agar laporan keuangan mudah dipahami dan dimengerti.

Laporan keuangan merupakan hal penting dan sudah menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaan/instansinya pada suatu periode yang telah ditentukan.

Menurut Kasmir (2016: 7) dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah: laporan yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Dalam laporan keuangan pada saat ini yaitu berkaitan kondisi terkini suatu perusahaan/instansi tersebut untuk mengetahui perkembangan perusahaan/instansi selama periode tertentu. Periode laporan keuangan, dibuat tiga bulan, atau enam bulan sehingga dengan adanya laporan keuangan, perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan terkini dengan menganalisis laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan salah satu sumber informasi serta dokumen penting yang digunakan oleh pengelolaan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang berkaitan mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan memiliki peranan penting dalam mengetahui nilai suatu sumber daya ekonomi untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, mengevaluasi efisiensi suatu entitas pelaporan keuangan dan mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sarwenda Biduri (2018: 96) mengatakan bahwa: “Hasil dari proses akuntansi yang penting dapat digunakan untuk pengambilan

keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan yaitu dapat mendefinisikan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen sebuah perusahaan dalam kondisi yang baik maupun sebaliknya”.

#### **2.4.1 Tujuan Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- b Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan - tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

#### **2.4.2 Komponen Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendeskripsikan laporan keuangan pokok pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 28, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

#### **2.5 Kinerja Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Halim (2007:24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut V. Wiratna (2017:71), kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan bersama.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari evaluasi terhadap kegiatan atau program yang digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

### **2.5.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2011), berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik.

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- c. Memperbaiki kinerja periode–periode berikutnya.
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
- e. Memotivasi pegawai.
- f. Menciptakan akuntabilitas publik.

Menurut Abdul dan Muhammad (2012), pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan.

## **2.6 Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan**

Menurut Nekky Rahmiyanti (2009:74-75) salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan analisa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah analisa rasio yang secara luas telah digunakan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik masih sangat terbatas dikarenakan keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.

Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.

### **2.6.1 Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Susanto (2015), mengatakan bahwa kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan

berdasarkan informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penggunaan analisis rasio difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu dapat pula dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI bekerjasama dengan FISIPOL UGM dalam Susanto (2014) mengemukakan bahwa untuk menentukan corak ekonomi daerah digunakan variabel-variabel pokok seperti: kemampuan keuangan daerah (tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan tingkat desentralisasi fiskal daerah), aparatur pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, ekonomi, demografi, organisasi masyarakat dan penunjang, terdiri dari aspek politik dan hukum yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan.

### **2.6.2 Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Alat analisis rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2014:267). Pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1 Analisis kinerja Pendapatan Daerah

a Analisis Varians (selisih) Pendapatan

Varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

Pemerintah Daerah memiliki kinerja yang baik ketika pendapatan lebih besar dari pada anggaran. Penilaian yang digunakan :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Varians (selisih) Pendapatan**

Varians Pendapatan	Kriteria
Varians positif atau realisasi pendapatan $\geq$ anggaran pendapatan	Baik
Varians negative atau realisasi pendapatan $\leq$ anggaran pendapatan	Kurang baik

Sumber : Mahmudi, 2010:137

b Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$PP_{Th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t - 1)}}{\text{Pendapatan Th (t - 1)}} \times 100\%$$

Penilaian yang digunakan dalam analisis rasio pertumbuhan pendapatan:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Pertumbuhan Pendapatan**

Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Kriteria
Pertumbuhan Pendapatan $\geq$ inflasi	Baik
Pertumbuhan Pendapatan $\leq$ inflasi	Kurang baik

Sumber : Mahmudi, 2010:139

c Analisis Rasio Kemampuan Daerah Memperoleh PAD

Pengukuran berdasarkan rasio keuangan dibagi menjadi 3 yaitu :

1) Rasio Derajat Desentralisasi

$$DD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi**

Rasio Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan
00,00% - 10,00%	Sangat kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Cukup
30,01% - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
50,01% - 60,00%	Sangat baik

Sumber : Mahmudi, 2010

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat + provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
00,00% - 25,00%	Rendah Sekali	Instruktif
25,01% - 50,00%	Rendah	Kosultatif
50,01% - 75,00%	Sedang	Partisipatif
75,01% - 100,00%	Tinggi	Delegasi

Sumber : Mahmudi, 2010

3) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Rasio Efektifitas PAD**

Rasio Efektifitas PAD	Kemampuan Keuangan
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2010:143

4) Rasio Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.6**  
**Kriteria Rasio Efisiensi PAD**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<5%	Sangat Efisien
5-10%	Efisien
11-20%	Cukup Efisien
21-30%	Kurang Efisien
>30%	Tidak Efisien

Sumber : Mahsun, 2011:171

d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.7**  
**Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah**

Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah %	Ketergantungan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,00 – 20,00	Kurang
20,00 – 30,00	Sedang
30,00 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Putra, 2018:62

2 Analisis Kinerja Belanja Daerah

a Analisis Varians (selisish) Belanja

Varians belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

Pemerintah Daerah memiliki kinerja yang baik ketika realisasi belanja lebih besar dari pada anggaran. Penilaian yang digunakan (Mahmudi, 2010:157) :

**Tabel 2.8**  
**Kriteria Varians (selisih) Belanja**

<b>Varians Belanja</b>	<b>Kriteria</b>
Varians positif atau realisasi belanja > anggaran belanja	Kurang baik
Varians negative atau realisasi belanja ≤ anggaran belanja	Baik

*Sumber : Mahmudi, 2010:157*

b Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 2.9**  
**Kriteria Efisiensi Belanja**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Efisiensi Belanja</b>
Efisien	<1000%
Tidak Efisien	>100%

*Sumber : (Mahmudi, 2010, 164–165)*

c Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

$$PB_{Th\ t} = \frac{\text{Belanja Th t} - \text{Belanja Th (t - 1)}}{\text{Belanja Th (t - 1)}} \times 100\%$$

Penilaian yang digunakan dalam analisis rasio pertumbuhan pendapatan (Mahmudi, 2010:160):

**Tabel 2.10**  
**Kriteria Pertumbuhan Belanja**

<b>Rasio Pertumbuhan Belanja</b>	<b>Kriteria</b>
Pertumbuhan Belanja ≤ Pertumbuhan Pendapatan	Baik
Pertumbuhan Belanja ≥ Pertumbuhan Pendapatan	Kurang baik

*Sumber : Mahmudi, 2010:160*

d Analisis Rasio Keserasian

- 1) Rasio Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja (BTL)

Belanja Langsung

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Tidak Langsung(BTL)

$$\text{BTL} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Seharusnya BL lebih besar dari BTL, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi output kegiatan, kriteria rasio (Mahmudi, 2010:164-165) :

**Tabel 2.11**  
**Kriteria Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**

<b>BL dan BTL</b>	<b>Kriteria</b>
Rasio BL > Rasio BTL	Baik
Rasio BL ≤ Rasio BTL	Kurang baik

*Sumber : Mahmudi, 2010:164-165*

2) Rasio belanja operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.12**  
**Kategori Tingkat Belanja**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Belanja Modal dan Belanja Operasi</b>
Tidak Baik	0% - 50%
Baik	50% - 100%

*Sumber : Halim 2007:236*

### 3 Analisis Kinerja Pembiayaan Daerah

SiLPA terjadi pada akhir tahun anggaran, serta dapat di hitung seperti berikut :

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus} + \text{Pembiayaan Netto}$$

SiLPA yang positif merupakan indikasi adanya kesehatan fiskal pada daerah tersebut. SiKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran) merupakan indikasi bahwa adanya masalah manajemen keuangan daerah dan mengganggu kesinambungan fiskal daerah. Kriteria yang digunakan (Mahmudi, 2010:17) :

**Tabel 2.13**  
**Pembiayaan Daerah**

<b>SiLPA</b>	<b>Kriteria</b>
< 5%	Baik (Sehat)
> 5%	Kurang baik (tidak sehat)

Sumber : Mahmudi, 2010:17

$$\text{SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Pendapatan} + \text{Penerimaan Pembiayaan}} \times 100\%$$

### 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.14**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Teknik Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Brian Sagay (2013)	Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Minahasa	Deskriptif	Kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola pendapatannya belum baik ini dilihat dari varian penapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran belanja sudah cukup baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang

		Selatan		dianggarkan.
2.	Mandey dan Rotinsulu (2015)	Analisis kinerja pendapatan asli daerah dikaitkan dengan belanja daerah pada pemerintah kota Bitung	Deskriptif	Kinerja Pemerintah Kota Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun.
3.	Muhammad dan soleh	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur	Kuantitatif	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dilihat dari rasio kemandirian tergolong masih rendah sekali, dilihat dari rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah kabupaten kaur kurang efektif, rasio aktivitas belanja operasi tergolong baik dan rasio belanja modal tergolong tidak baik, dan rasio pertumbuhan PADnya mengalami peningkatan dengan kategori sedang.
4.	Nenda Marliani (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	Deskriptif	Kinerja Keuangan Kabupaten Bandung tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan hasil penelitian rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultif. Rasio derajat desentralisasi termasuk kategori kurang sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih kurang. Rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif. Rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien.
5.	Heri Faisal Harahap (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	Deskriptif kuantitatif	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan pemerintah pusat atau provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan.

## **2.8 Kerangka Berpikir**

Kabupaten Manggarai adalah salah daerah otonomi yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat maupun provinsi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Manggarai mempunyai wewenang untuk menggali semua potensi sumber daya yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan langsung dari pemerintah pusat dengan tujuan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah yang otonom, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan daerah. di pandang perlu untuk mengukur kinerja keuangan, Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas adalah dengan melakukan analisis atas laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengetahui kinerja keuangan daerah. adapun rasio yang diukur adalag sebagai berikut : 1. Kinerja Pendapatan Daerah, 2. Kinerja Belanja Daerah dan, 3. Kinerja Pembiayaan Daerah. Kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berpikir**

